

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 26 No.1, Maret 2018

Lahan Basah Perkotaan Menjadikan kota sebagai tempat tinggal yang layak

Menyaring dan meningkatkan kualitas air

Membuka peluang untuk rekreasi dan pendidikan

Menciptakan peluang mata pencaharian bagi masyarakat

Menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati

Meredam dampak banjir dan hantaman badai

Meningkatkan kualitas udara dan meredam pusat-pusat panas

Memperbaharui sumber air tanah

Lahan Basah membuat kota menjadi lebih hidup



Salam redaksi,

Dinamika yang terus berlangsung sejak awal tahun 2018 pada sektor pembangunan lingkungan telah membubuhkan banyak warna pada hari-hari yang kita lewati. Beberapa misi mulai menampakkan titik terang, sementara beberapa lainnya masih menyisakan tugas besar untuk ditindaklanjuti. Tercatat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2018, seperti Asian Waterbird Census (AWC) yang diikuti oleh semakin banyak relawan, peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang berfokus pada pelestarian lahan basah perkotaan, dan semakin populernya istilah maupun isu terkait penurunan muka tanah (land subsidence). Pada edisi kali ini kami mengedepankan rangkaian informasi dan catatan penting yang dapat menginspirasi gerak langkah dan perjuangan pada bulan-bulan berikutnya di tahun yang penuh harap ini. Karena pelestarian lingkungan adalah sebuah misi.

Selamat membaca.

Fokus Lahan Basah

Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir Kota: Melalui Marunda untuk Jakarta 3

Konservasi Lahan Basah

Geliat Burung Air dan Ekosistemnya dalam Perubahan Undang-Undang Konservasi 4

Berita Lahan Basah

Bersama Anak-Anak Memperingati Hari Lahan Basah Sedunia 2018 6

Pengukuran Ketebalan Gambut di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan" 8

Lokakarya Nasional: "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir" 10

Rangkaian Kegiatan *Steering Committee Meeting* Program Building with Nature 12

Wisata Berbasis Lahan Basah, antara Kenangan Manis dan Risiko 14

Budidaya Kepiting Soka (*Scylla sp*) 16

AWC 2018: Si Bluwok (*Wilwo*, *Mycteria cinerea*) "Nasibmu, di Segara Anakan Cilacap" 18

Flora & Fauna Lahan Basah

Si Genteng Wilwo 20

Palas, Si Pahit yang Berkhasiat 20

Dokumentasi Perpustakaan 19

DEWAN REDAKSI:

Pembina:

Head of Office
Wetlands International Indonesia

Pimpinan Redaksi:

Yus Rusila Noor

Anggota Redaksi:

Mauliyati Nuraeni Slamet
Triana

"Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya"



Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



UCAPAN

TERIMA KASIH DAN UNDANGAN

Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh penulis yang telah secara sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman berharganya untuk dimuat pada majalah ini.

Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, klipng, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 maksimal 2 halaman A4 (sudah berikut foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada:

Triana - *Publication & Information*
Wetlands International Indonesia
Jl. Bango No. 11 Bogor 16161
tel: (0251) 8312189
fax./tel.: (0251) 8325755
e-mail: publication@wetlands.or.id

Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir Kota: Melalui Marunda untuk Jakarta

Yohan Rahmat S. dan Arfiana Khairunnisa***

Sejak awal tahun 2015, Cordaid melalui KARINA Yogyakarta mulai mempersiapkan sebuah program pembangunan ketangguhan masyarakat pesisir kota melalui pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu. Pendekatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2010 melalui program *Partners for Resilience*.

KARINA Yogyakarta yang bermitra dengan Bina Swadaya Konsultan, bekerja di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Wilayah ini terletak bersanding dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Melalui Kajian Risiko Partisipatif, KARINA Yogyakarta dan Bina Swadaya Konsultan telah melakukan suatu

kajian di wilayah Marunda. Hasil kajian ini kemudian didiskusikan bersama masyarakat setempat dan Pemerintah Kelurahan Marunda untuk kebutuhan verifikasi dan penyusunan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat Marunda.

Sebagai salah satu wilayah pesisir di Jakarta, yang merupakan wilayah hilir dari aliran Kanal Banjir Timur dan kawasan hilir DAS Ciliwung Cisadane sub DAS Cakung, permasalahan lingkungan menjadi hasil temuan utama kajian risiko tersebut. Diantaranya banyak sampah yang terbawa oleh aliran sungai yang terkumpul di hilir Kanal Banjir Timur, pencemaran air permukaan dan air tanah, dan rusaknya ekosistem

pesisir karena buruknya kondisi lingkungan.

Padatnya penduduk Marunda, yang sebagian diantaranya adalah pendatang dari luar, memunculkan banyak hunian kumuh, ditambah lagi dengan keterbatasan lahan untuk perumahan. Rob dan banjir kiriman dari wilayah hulu juga membawa lebih banyak petaka. Kemiskinan yang menjadi masalah utama pun muncul. Masyarakat Marunda banyak yang bekerja di sektor informal seperti buruh atau tukang ojek, penghidupan layak berkelanjutan pun tak mampu dimiliki karena degradasi lingkungan.

.....bersambung ke hal 21



Pertanian perkotaan di Marunda (Foto: Kasan Kurdi)

Geliat Burung Air dan Ekosistemnya dalam Perubahan Undang-Undang Konservasi

Ragil Satriyo Gumilang* dan Yus Rusila Noor**

BURUNG AIR SEBAGAI DUTA LAHAN BASAH

Menilik sejarah Konvensi Ramsar, (yaitu perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan, yang pertama kali disepakati oleh negara-negara peserta konvensi di Ramsar tahun 1971), mulanya lebih berfokus pada perlindungan burung air, baik penetap maupun migran. Selanjutnya fokus berkembang pada perlindungan lahan basah sebagai suatu ekosistem, dikarenakan peran dan fungsi yang dimiliki lahan basah sangat penting, diantaranya sebagai pengatur tata air dan habitat bagi beranekaragam spesies diantaranya burung-burung air.

Pembahasan tentang burung air memang sulit dipisahkan dari permasalahan ekosistemnya, yaitu lahan basah. Lahan basah merupakan habitat yang mendukung kehidupan burung air, baik sebagai tempat mencari makan, berbiak, persinggahan, dan sebagainya.

Setelah fokus pada perlindungan spesies, selanjutnya berkembang pada perlindungan habitat dan kesadaran keutuhan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya. Saat ini ranah Konvensi Ramsar berfokus pada seluruh aspek konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijak (*wise use*).

Keberadaan burung air sebagai kriteria penentuan Situs Ramsar menjadi kriteria yang cukup istimewa. Kriteria

husus burung air mengatur bahwa untuk ditetapkan sebagai Situs Ramsar lokasi lahan basah secara teratur mendukung/dihuni oleh 20.000 atau lebih populasi burung air (Kriteria 5), dan/atau terdapat individu-individu dari satu spesies burung air hingga 1% dari total populasi spesies burung air tersebut (Kriteria 6). Tanpa mengesampingkan kriteria lainnya, yaitu keterwakilan, langka atau unik, status konservasi keanekaragaman hayati, serta kriteria khusus ikan dan jenis-jenis lain, kriteria khusus burung air ini pun semacam menegaskan bahwa mereka merupakan 'duta lahan basah' yang sangat penting.

KOMITMEN INDONESIA

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak tahun 1991. Hal ini menjadi landasan kebijakan sekaligus wujud komitmen Indonesia dalam mendukung konservasi ekosistem lahan basah global. Indonesia pun menjadi terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu suatu prinsip fundamental yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik (*good faith*).

Dalam perkembangannya, telah ditetapkan 7 Situs Ramsar di Indonesia. Selain sebagai wujud itikad baik, penetapan ini juga akan menguntungkan bagi Indonesia, yaitu sarana mempromosikan warisan alam nasional ke dunia internasional sehingga dapat menarik kunjungan

asing untuk wisata, riset, budaya, dan pendidikan. Penetapan situs ini pun menjadi sarana diplomasi internasional untuk memperkenalkan dan meningkatkan kredibilitas Indonesia kepada dunia dari sisi pengelolaan kawasan konservasi lahan basah.

Substansi dan nilai-nilai dari Konvensi Ramsar telah dimuat di dalam beberapa peraturan yang terkait dengan konservasi ekosistem alami dan lahan basah. Salah satu kebijakan yang sangat dekat dengan konservasi lahan basah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Di dalamnya, substansi konservasi lahan basah telah dimasukkan ke dalam norma mengenai perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Demikian juga dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, telah dimasukkan beberapa jenis lahan basah sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi.

Pemerintah dapat mengusulkan suatu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagai warisan alam dunia (*world heritage site*), cagar biosfer, atau sebagai perlindungan tempat migrasi satwa internasional (*ramsar site*) kepada lembaga internasional yang berwenang untuk ditetapkan. Namun sayangnya hal ini belum dibarengi dengan ketentuan yang memadai mengenai dukungan pendanaan khusus bagi situs-situs tersebut.



Burung-burung air di TN. Berbak Sembilang (Foto: Yus Rusila Noor)

Kebijakan saat ini seakan 'belum mampu' menegaskan pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati lahan basah di luar KSA dan KPA. Padahal hasil riset menyebutkan bahwa sekitar 80% satwa liar yang bernilai penting berada di luar kawasan konservasi. Diperkirakan Indonesia memiliki sekitar 105 juta hektar ekosistem penting dan ekosistem penyangga/ penghubung terestrial yang berada di luar KSA dan KPA.

Sebagai contoh norma dalam penjelasan PP 28/2011 telah memuat definisi kawasan ekosistem esensial, yaitu ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA. Definisi ini sangat lekat dan sejalan dengan pengertian lahan basah dalam Konvensi Ramsar. Namun sayangnya, aturan tersebut tidak memberi mandat untuk menyusun aturan pelaksanaan mengenai kawasan ekosistem esensial. Hal ini dapat dipahami karena aturan induknya pun belum cukup mengakomodasi perlindungan di luar kawasan konservasi yang bernilai penting.

PERUBAHAN UU KONSERVASI: DIBUTUHKAN ATAU TIDAK?

Dalam perkembangannya, sejak 10 tahun lalu UU KSDAHE dinilai perlu disempurnakan. UU KSDAHE dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan dan kebutuhan hukum

di dalam penyelenggaraannya. Norma yang tertuang juga masih banyak yang bersifat umum dan terlalu banyak didelegasikan pada peraturan pelaksanaannya.

Namun, sudut pandang pemerintah berbeda. Seusai rapat terbatas awal April 2018 lalu mengenai rancangan perubahan UU KSDAHE yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM mengatakan kepada media massa bahwa perundangan saat ini sudah cukup untuk mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Artinya bahwa perubahan atas UU KSDAHE, yang telah masuk Prolegnas sebagai usulan DPR, dianggap Pemerintah belum dibutuhkan saat ini.

Pada hal, salah satu semangat perubahan fundamental yang tertuang dalam Rancangan UU KSDAHE adalah mengisi kekosongan hukum dan kelembagaan dalam berbagai konteks konservasi kekinian. Seperti mengatur perlindungan dan pemanfaatan terhadap sumber daya genetika yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya. Selain lebih menitikberatkan pada upaya-upaya konservasi di darat dan seakan mengesampingkan konservasi di wilayah perairan atau laut, UU KSDAHE juga belum cukup mengakomodasi perlindungan di luar kawasan konservasi yang bernilai penting (ekosistem esensial). Norma yang ada seharusnya juga mencakup kawasan penyangga, koridor, dan areal persinggahan satwa migran di luar kawasan konservasi.

Dari sisi perlindungan spesies, UU KSDAHE dan aturan pelaksanaannya belum secara tegas melindungi kelompok jenis-jenis burung migran, meskipun sebagian kecil jenis burung migran telah masuk daftar jenis yang dilindungi. Rancangan UU KSDAHE telah cukup baik mengakomodasi hal tersebut, antara lain mengatur ketentuan mengenai penetapan status perlindungan spesies berdasarkan kriteria tingkat ancaman kepunahan. Burung migran yang memiliki perilaku dan sifat biologis unik dianggap rentan terhadap bahaya kepunahan. Sehingga, dipertimbangkan sifatnya sebagai kriteria spesies dilindungi.

Dalam RUU yang telah disusun, telah tertuang ketentuan yang mengakomodasi kelemahan ini, termasuk mengatur norma mengenai ekosistem lahan basah dan keanekaragaman hayati di dalamnya, termasuk burung air sebagai ikon lahan basah. Tentunya banyak pihak mengharapkan pemerintah meninjau ulang keputusannya dan kemudian bersama DPR RI melanjutkan proses pembahasan dan penetapannya. Semoga dalam kelanjutannya, tidak menafikan masukan dari para penggiat konservasi mulai dari proses kajian, konsultasi publik, dan pembahasan cukup panjang, yang pernah dilaksanakan selama 10 tahun terakhir ini.

* *Wetlands International Indonesia*
* *ragilsatriyo@gmail.com*

** *Wetlands International Indonesia*
** *noor@wetlands.or.id*

Bersama Anak-Anak Memperingati Hari Lahan Basah Sedunia 2018

*Mauliyati Nuraini Slamet**

Dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2018, Wetlands International Indonesia mengajak anak-anak untuk mengenali dan mencintai lingkungan mereka.

Hari Lahan Basah Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 2 Februari diperingati secara serentak di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Wetlands International Indonesia mengambil bagian dalam peringatan tersebut, dengan mengajak anak-anak, sebagai generasi penerus di masa depan, untuk mengenali dan mencintai lingkungan hidup mereka. Acara yang berlokasi di Situ Gede-Hutan

Penelitian Dramaga, Bogor, ini merupakan satu dari tiga rangkaian peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang diprakarsai oleh KLHK. Dua acara serupa dengan penekanan berbeda dilakukan di Jambi, Sumatera Selatan (26-27 Februari), dan di kampus IPB (1 Maret).

Pembukaan acara ini disampaikan oleh pimpinan Wetlands International Indonesia yang memberikan penjelasan tentang pentingnya fungsi lahan basah perkotaan, seperti danau maupun situ, sebagai penampung air yang menahannya sebelum kemudian dialirkan ke sungai-sungai utama dan akhirnya ke muaranya, di pesisir utara Jakarta. Oleh karena itu, keberadaan situ sangatlah penting, tidak hanya bagi masyarakat yang

tinggal di sekitarnya, tetapi juga bagi keseluruhan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) – sebagai sumber keanekaragaman hayati, sumber mata pencaharian masyarakat, hingga pencegah banjir. Hilang maupun menurunnya fungsi situ-situ di Bogor akan memperparah kejadian banjir di Jakarta.

Turut membuka acara adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Krisfianti L. Ginoga, yang menyampaikan bahwa Hutan Penelitian Dramaga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Situ Gede. Sebagai salah satu dari sedikit situ yang masih tersisa di Bogor, maka tujuan pengelolaan kawasan Situ Gede-Hutan Penelitian Dramaga adalah untuk mengembangkan potensi



Anak-anak tampak menikmati dan menyimak dengan serius penjelasan yang diberikan pada saat kegiatan jelajah hutan (Foto: Yus Rusila N.)



Staf Wetlands saat memberikan hadiah kepada pemenang lomba menceritakan jelajah hutan (Foto: Ragil S.G.)



Salah satu peserta lomba menggambar sedang asyik mewarnai gambarnya (Foto: Yus Rusila Noor)



Anak-anak maupun dewasa tampak menikmati foto-foto yang dipamerkan di lokasi (Foto: Yus Rusila Noor)

sumber daya hutan, mengembangkan *parent stock*, menjadi pusat alih teknologi, serta dipersiapkan menuju perwujudan menjadi taman hutan raya bertaraf internasional. Kecenderungan semakin banyaknya masyarakat yang menggemari wisata alam, menjadi penting untuk juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi ekologis daerah wisata alam yang mereka kunjungi, sehingga risiko kerusakannya pun dapat diminimalisir.

Dalam mempertahankan keberadaan lahan basah di wilayahnya, Camat Bogor Barat, Pupung W. Purnama, mengakui adanya kendala, karena fungsi utama dari wilayah Bogor Barat adalah lahan pertanian, sawah, yang juga adalah lahan basah. Tapi, di sisi lain, sawah itu sebagian besar milik pribadi, sehingga ketika dirasa sudah tidak produktif, maka pemiliknya ingin mengalihfungsikan. Oleh karena itu, beliau mengusulkan agar isu lahan basah ini juga dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, untuk memastikan terpeliharanya lahan-lahan basah di wilayah Bogor Barat. Suatu usulan yang sangat relevan mengingat pentingnya keberadaan lahan basah untuk mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah lainnya, sehingga perlu upaya yang lebih serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk mempertahankan dan melestarikan keberadaannya.

Peran Wetlands International Indonesia, berdampingan dengan berbagai organisasi konservasi lingkungan lainnya di Indonesia, adalah untuk memberikan penyadartahuan, meningkatkan pemahaman, dan prakarsa masyarakat luas dalam melestarikan lingkungannya. Penyadartahuan ini penting untuk ditanamkan sedini mungkin dalam diri anak-anak, karena di tangan merekalah kelak menigkat atau memburuknya kualitas lingkungan kita kelak. Anak-anak yang dilibatkan dalam acara peringatan Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2018 ini adalah siswa-siswi SD di sekitar Situ Gede-Hutan Penelitian Dramaga.

Mereka dilibatkan dalam kegiatan jelajah hutan, dengan menyusuri jalan setapak di dalamnya. Banyak pembelajaran dan pemahaman baru yang didapat, seperti betapa beragamnya pepohonan dan berbagai spesies makhluk hidup yang bertempat tinggal di Hutan Penelitian Dramaga. Sekembalinya dari kegiatan jelajah hutan, anak-anak ini kemudian menceritakan kembali dalam bentuk tulisan tentang apa yang mereka lihat dan pelajari dalam perjalanan. Adalah luar biasa betapa anak-anak dengan mudah mengingat apa yang mereka lihat dan dengar, karena pengalaman jelajah hutan tersebut begitu berkesan di dalam benak mereka.

Selain kegiatan jelajah hutan, sebagian dari anak-anak yang hadir ikut serta dalam lomba menggambar dengan tema "Masa Depan

Lingkungan yang Kita Harapkan". Melalui lomba menggambar ini, diharapkan anak-anak dapat menerjemahkan imajinasi serta pemahaman mereka mengenai kelestarian lingkungan ke dalam bentuk kreativitas, dalam bentuk gambar. Melalui pengalaman mengikuti lomba ini diharapkan terbentuk kesan yang mendalam pada diri anak-anak tentang lingkungan yang bersih, indah, dan lestari, yang sejatinya dapat mereka wujudkan di masa depan.

Di salah satu sudut lokasi kegiatan juga dipajang puluhan foto-foto hasil jepretan staf Wetlands International Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Pada foto-foto yang dipajang ini, penikmat diberi kesempatan untuk urun suara pada foto yang paling mereka sukai dengan cara menempelkan *sticker*. Dari kegiatan ini terlihat bahwa kecenderungan minat para penikmat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, adalah gambar burung di alam. Selain membangkitkan rasa cinta terhadap lingkungan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menanamkan inspirasi dalam diri anak-anak tentang hakikat dan pentingnya memastikan hak hidup makhluk hidup lain di tempat hidupnya masing-masing, atau keseimbangan alam akan hilang, dengan berbagai risiko kerusakan dan kebinasaan. ••

* *Wetlands International Indonesia*
maulyati.slamet@wetlands.or.id

Pengukuran Ketebalan Gambut di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

*Triana**

Manusia dan lingkungan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya. Kehidupan manusia sangat tergantung pada keberadaan suatu lingkungan, sebaliknya lingkungan memerlukan tangan-tangan ramah dan amanah untuk mengelolanya secara keberlanjutan. Apabila lingkungan sehat dan tangguh maka ia akan senantiasa memberikan peran dan manfaat kebaikan bagi segenap umat manusia, namun sebaliknya apabila lingkungan rusak dan hancur maka bencana dan kehancuran pulalah yang akan diterima manusia.

Lahan basah adalah salah satu bagian dari lingkungan yang didalamnya menyimpan berbagai peran dan fungsi bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Sebagai sumber kehidupan, lahan basah menjadi penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan. Itu pulalah yang melatarbelakangi negara-negara berkumpul di Kota Ramsar, Iran, pada tanggal 2 Februari 1971 silam, untuk menyepakati pentingnya perlindungan dan pelestarian lahan basah di seluruh belahan bumi. Kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Konvensi Ramsar tersebut, mengamanatkan setiap negara-negara anggota (Ramsar) untuk memperingati Hari Lahan

Basah Sedunia di negaranya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia yang terdaftar masuk anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991.

Tema global Hari Lahan Basah Sedunia 2018 adalah "Lahan basah untuk masa depan perkotaan yang berkelanjutan", mengesankan bahwa peringatan di wilayah pedesaan tidak ada kaitannya. Tema WWD 2018, memang menyoroti fenomena pesatnya perkembangan populasi penduduk yang sebagian menempati pusat-pusat perkotaan. Kondisi tersebut masih akan terus meningkat seiring kemajuan perkotaan yang menjadi magnet daya tarik penduduk di wilayah pinggiran



untuk pindah ke kota. Tema "lahan basah bagi masa depan perkotaan yang berkelanjutan", menjadi isu besar dunia saat ini. Namun, apabila kita maknai dan bicara tentang lahan basah sebagai suatu kesatuan ekosistem, Daerah Aliran Sungai, hulu-hilir, atau fenomena perubahan iklim global, maka lahan basah juga menjadi sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh pelosok wilayah tidak terkecuali di desa-desa.

Tim survei dari Wetlands International Indonesia merayakan Hari Lahan Basah Sedunia 2018 dengan melakukan kegiatan pengukuran ketebalan gambut di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bersama masyarakat Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam.

Tim survei dibagi menjadi empat regu masing-masing didampingi sekitar 5-7 orang masyarakat Desa Riding. Garis transek yang harus dilalui oleh setiap regunya memiliki panjang 10 km yang terdiri dari 21 titik pengeboran, dengan jarak 500 meter setiap titiknya. Kondisi rawa gambut cukup sulit untuk dilalui dimana tim harus membuka atau merintis jalan baru, sehingga mengharuskan tim survei melakukan *fly-camp* atau menginap di dalam rawa gambut selama kegiatan.

Metode pengeboran gambut diukur dengan menggunakan bor gambut manual, yaitu bor mata tombak dan bor coring (*Eijkelkamp*). Mata bor gambut dimasukkan ke dalam gambut yang telah ditentukan koordinatnya secara vertikal. Pengukuran dilakukan bertahap dengan interval 50 cm setiap, hingga sampel substrat tanah mineral atau berpasir terbawa dalam *groove* (ujung bersela pada bor tombak) atau *chamber* (pada bor coring). Tekstur sampel substrat tanah mineral ditandai oleh rasa yang kenyal, berwarna terang atau

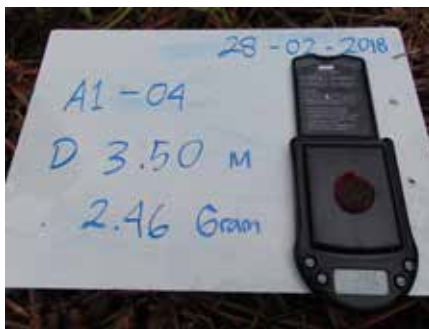
kelabu dan agak lengket, sedangkan substrat berpasir ditandai adanya butiran-butiran pasir didalam sampel.



Sampel tanah mineral (Foto: Triana)

Dari ketiga garis titik-titik pengeboran khususnya di SM Padang Sugihan yang masuk wilayah Desa Riding, didapatkan ketebalan gambut berkisar antara 2 – 7 meter, dengan tutupan lahan berupa semak belukar, yang kadang diselingi beberapa pohon gelam, gabus dan perepat.

Setiap hasil pengukuran dan penimbangan dicatat pada lembar isian lapangan, disertai dengan kode lokasi, tanggal dan koordinat. Dari 21 titik pada *line* A1, hampir keseluruhan tinggi muka air yang diukur berada di atas permukaan tanah gambut. Hal ini dapat diindikasikan bahwa telah terjadi penurunan muka tanah gambut (*subsiden*) di lokasi tersebut. Kondisi demikian diperparah lagi dengan kebakaran lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun (kebakaran besar pada tahun 2015), yang menyebabkan lapisan bagian atas tanah gambut hilang terbakar.



Penimbangan berat sampel (Foto: Iman/ Dok. WII)

Dari penjelajahan rawa gambut di SM Padang Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, tim menyaksikan suatu pemandangan yang sangat memprihatinkan, sebagian wilayah SM Padang Sugihan dan Desa Riding kini bagai padang semak belukar yang gersang dan rentan terbakar. Tidak ada lagi tegakan pohon Jelutung (*Dyera polyphylla*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti rawa (*Shorea pauciflora*) yang dulu rindang memayungi tanah gambut di sana. Nasi sudah menjadi bubur, kondisi sebagian rawa gambut di Desa Riding yang mencakup gambut di SM Padang Sugihan, Hutan Desa dan Hutan Produksi, nyatanya sudah habis terbakar. Kesalahan besar di masa lalu jangan sampai terulang lagi dan terpenting adalah harus segera dilakukannya upaya-upaya restorasi dan rehabilitasi lahan gambut.

Harapan kembali pulihnya hutan rawa gambut akan selalu ada apabila kita semua mau bersinergi, bersepakat, berpikir dan berkarya bersama dengan dilandasi norma-norma hukum, budaya dan peradaban. Dengan patuh dan taat kepada hukum, empati dan hormat pada budaya dan kearifan lokal, serta menjunjung nilai-nilai pemanfaatan yang beradab yang memperhatikan kepentingan umat manusia dan lingkungan secara komprehensif, bukan hal yang mustahil suatu saat ekosistem gambut akan terkelola secara bijak dan berkelanjutan.

"Ketangguhan ekosistem lahan basah di perkotaan maupun di pedesaan, adalah masa depan bagi SATU BUMI yang kita pijak ini" ••

Selamat Hari Lahan Basah Sedunia 2018 ...

*Wetlands International Indonesia
publication@wetlands.or.id

Lokakarya Nasional "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir"

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bekerjasama dengan Wetlands International Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir", pada tanggal 27-28 Maret 2018, di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat. Lokakarya dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan: Pemerintahan Pusat dan Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, dan para pakar.

Penyelenggaraan lokakarya dilatarbelakangi keprihatinan bersama atas penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang terus terjadi di sebagian wilayah pesisir Indonesia. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit dan HTI di lahan

gambut serta ekstraksi air tanah yang tidak terkendali di perkotaan seperti di DKI Jakarta, Semarang dan Demak, menyebabkan tenggelamnya desa-desa pesisir.

Butir-butir Rekomendasi

Dataran rendah pesisir di Indonesia (diperkirakan sekitar 30 juta hektar) terdiri dari berbagai ekosistem lahan basah penting, seperti ekosistem mangrove, gambut, muara sungai, laguna, budi daya perairan dan lahan pertanian pasang surut, dengan elevasi dari permukaan laut kurang dari 30 meter. Diantara berbagai jasa lingkungan yang diberikan oleh lahan basah pesisir adalah sebagai tempat tinggal dan mencari makan biota pesisir, pencegah intrusi air laut,

penyimpanan dan pemasok air tawar, cadangan karbon yang sangat besar, serta untuk mitigasi bencana.

Kondisi pesisir di Indonesia saat ini terancam akibat alih fungsi untuk kepentingan lain yang dianggap bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, pengambilan air tanah di wilayah pesisir oleh masyarakat perkotaan (khususnya untuk kebutuhan industri) dan terjadinya pengeluaran air secara berlebihan melalui kanal-kanal drainase/ pengeringan di lahan gambut (seperti oleh perkebunan sawit dan akasia) telah mempercepat proses turunnya permukaan tanah. Di sisi lain, permukaan air laut juga mengalami kenaikan akibat perubahan iklim. Dua peristiwa yang saling terkait tersebut, telah menimbulkan ancaman dan bencana



Foto bersama peserta lokakarya (Foto: Hidayat Sunarsyah/Dok. Wetlands Internatinal Indonesia)

di wilayah pesisir yang memerlukan perhatian segera untuk tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Menyadari kondisi tersebut di atas, kami peserta "Lokakarya Nasional Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir", menyepakati hal-hal berikut:

1. Penurunan muka tanah telah nyata terjadi di wilayah pesisir kota-kota besar serta di wilayah lahan gambut. Kondisi tersebut telah berdampak terhadap kelestarian ekosistem pesisir, mempengaruhi kehidupan manusia yang tinggal di wilayah pesisir serta menghambat tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir;
2. Kerja sama multi pihak dan lintas sektoral sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penurunan muka tanah, dengan melibatkan masyarakat di tingkat lokasi;
3. Pemerintah perlu segera menentukan *leading agency* untuk mengatasi persoalan penurunan muka tanah tersebut;
4. Pemerintah, melalui *multi-stakeholder process*, diharapkan segera menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) dan/ atau Rencana Induk (*Masterplan*) untuk pencegahan dan penanggulangan penurunan muka tanah di tingkat daerah dan nasional yang kemudian diturunkan ke dalam rencana aksi lima dan satu tahunan;
5. Perlu disusun tim kecil yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dalam menyusun Peta Jalan dan/ atau Rencana Induk maupun Rencana Aksi tersebut diatas, bahkan bila dimungkinkan mendorong penerbitan peraturan pelaksanaannya.

Beberapa rekomendasi dari para peserta pertemuan untuk dimasukkan ke dalam Peta Jalan dan/atau

Rencana Induk Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir, sbb:

A. Penyadartahuan

Meningkatkan kesadartahuan berbagai pihak akan ancaman penurunan muka tanah, beserta dampak dan akibatnya, yang dilakukan secara terprogram dan terarah dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi.

B. Konservasi Sumber Daya Air Tanah

Konservasi sumber daya air tanah dilakukan dengan cara antara lain :

1. Melakukan pengkajian terkait penggunaan air bawah tanah di wilayah yang teridentifikasi mengalami penurunan muka tanah;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan air tanah secara lebih baik, yakni dengan menunjuk inspektorat tersendiri, yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai;
3. Melakukan penghentian dan/ atau pengurangan pengambilan air tanah di lokasi-lokasi yang teridentifikasi berada dalam zona rawan amblesan;
4. Mengidentifikasi alternatif sumber air lainnya, sebagai pengganti dari air tanah, disertai dengan penguatan infrastrukturnya;
5. Melakukan pemulihan sumber air tanah (*ground water re-charging*) di wilayah perkotaan pesisir, dengan mengoptimalkan tangkapan air hujan, penyediaan tandon air, gerakan lumbung air (*water harvesting*), pemanfaatan kembali air bekas pakai (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) serta elemen konservasi air lainnya yang mendukung penyediaan air secara berkelanjutan;

6. Melakukan pengelolaan air: pemisahan saluran limbah (*sewerage*) dan saluran air bersih (*drainage*) serta membangun Pusat Pemrosesan Air Limbah (*Sewerage Treatment Plant - STP*);
7. Melakukan rehabilitasi wilayah tangkapan air yang telah mengalami kerusakan.

C. Konservasi Kawasan Lahan Basah Pesisir

1. Menghentikan alih fungsi kawasan lahan basah pesisir;
2. Melakukan restorasi hidrologi dengan menghentikan pembangunan 'kanal-kanal drainase baru' di lahan gambut dan/atau melakukan penutupan/ penyekatan kanal-kanal lama di lahan gambut yang sudah telanjur dibuka, dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang sudah ada (PP71/2014 Jo PP57/2016, berikut peraturan turunannya);
3. Mengembalikan fungsi dan melakukan rehabilitasi wilayah mangrove dan/atau lahan gambut pesisir yang sudah telanjur dialihfungsikan atau mengalami kerusakan dengan memperhatikan pertimbangan ekologis, hidrologis, dan melibatkan masyarakat setempat;
4. Mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana serta perlindungan ekosistem mangrove dan gambut kedalam rencana tata ruang wilayah dalam satu kesatuan ekosistem dan hidrologis. Seperti di antaranya monitoring muka air gambut serta analisa risiko banjir dan abrasi;
5. Mengembangkan penelitian pengelolaan lahan basah pesisir secara berkelanjutan (seperti di antaranya terkait dengan paludikultur dan wanamina)

.....bersambung ke hal 17

Rangkaian Kegiatan *Steering Committee Meeting* Program Building with Nature

Apri Susanto Astra dan Olivia A. Sope***

Salah satu agenda rutin dari program Building with Nature (BwN) adalah kegiatan pertemuan anggota *Steering Committee (SC)* dan *Technical Committee (TC)* yang secara umum bertujuan untuk memperbaharui informasi perkembangan program, evaluasi dan rencana kerja bersama di tahun berjalan. Pada tahun 2018 ini, selain menindaklanjuti hasil pertemuan di tahun sebelumnya, beberapa topik baru menjadi agenda dalam pertemuan SC dan TC BwN, yaitu rencana pembentukan BwN platform dan tim *reference panel*.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan tim SC ke salah satu desa lokasi kegiatan

di Kabupaten Demak, yaitu Desa Tambakbulusan pada tanggal 6 Februari 2018. Kegiatan kunjungan tersebut diisi dengan pertemuan dan diskusi dengan Kelompok Tani Jaya Bhakti mengenai perkembangan kegiatan kelompok dalam melaksanakan program-program BwN di Desa Tambakbulusan. Tim SC kemudian mengunjungi beberapa lokasi kegiatan kelompok seperti produksi kompos dan MOL (mikro-organisme lokal), lokasi kerja sama penelitian dengan UNDIP, tambak dengan sistem *mixed-mangrove* aquaculture, lokasi penangkapan sedimen, serta struktur permeabel yang dibangun pada tahun 2107 di Desa Surodadi.

Pertemuan SC BwN dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018 dan dihadiri oleh direktur EcoShape, CEO Wetlands International, Head of Office Wetlands International Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PUSAIR-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KPUPR). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh undangan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak, di antaranya yaitu Sekretaris Daerah, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta DKP dari kabupaten-kabupaten yang mendapatkan



Pertemuan Steering Committee program Building with Nature (Foto: Yus Rusila Noor)

program struktur permeabel dari KKP. Pertemuan SC ini lebih difokuskan kepada hal-hal strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan program BwN di lapangan dan pengarusutamaan BwN di Indonesia.

Berikut adalah beberapa keputusan yang dihasilkan dari pertemuan SC BwN:

1. SC mengakui perkembangan program, serta tantangan yang muncul dengan adanya penurunan muka tanah dimana tujuan akhir program ada kemungkinan sulit tercapai karena masalah tersebut;
2. SC menyetujui bahwa pendekatan BwN tetap untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem, sehingga menunda dampak dan memberikan peluang untuk beradaptasi terhadap bencana;
3. SC mendukung penyesuaian pendekatan BwN yang melibatkan implementasi bersama masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peninjauan kembali pendekatan IWRM;
4. SC menyetujui perlunya dibuat peta jalan (*roadmap*) untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah;

5. SC menyetujui bahwa tantangan di Demak memerlukan solusi holistik seperti pendekatan BwN, serta perlunya ditingkatkan upaya pengarusutamaan;
6. SC mendukung perubahan BwN Secretariat menjadi *platform* independen atau pusat unggulan;
7. SC mendorong kegiatan percontohan (*piloting*) baru di Indonesia dan pengembangan BwN *action plan*;
8. SC mengamanatkan kepada TC untuk menindaklanjuti dokumen *Sustainability Compact* dan Rencana Kerja (*Work Plan*).

Pada makan malam pasca pertemuan SC BwN yang dihadiri oleh semua undangan dan beberapa peserta tambahan, kembali didiskusikan mengenai BwN *platform* dan isu penurunan muka tanah. Dari diskusi tersebut, disimpulkan bahwa BwN *platform* akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi, pengembangan rencana kerja, serta konsultasi bagi yang tertarik dengan pendekatan BwN. Bentuk ideal dari BwN *platform* juga disepakati harus memenuhi syarat tata kelola, pembentukan,

keanggotaan, khalayak sasaran, cara beroperasi dan lokasi platform.

Sementara itu, mengenai isu penurunan muka tanah yang terus berlangsung dengan cepat di Kabupaten Demak, disebutkan bahwa masalah tersebut menarik banyak perhatian yang diyakini peserta harus menjadi tanggung jawab bersama oleh semua pemangku kepentingan. Para peserta menyepakati tiga solusi, yaitu menghentikan pengambilan air tanah, pengaturan pasokan air permukaan dan pendistribusiannya. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan kajian ekstensif tentang pasokan dan kebutuhan air, tidak hanya di Demak tetapi juga kaitannya dengan Kota Semarang.

Pembahasan dan tindak lanjut dari hasil pertemuan SC BwN secara lebih detil dilaksanakan dalam pertemuan TC BwN pada hari berikutnya, 8 Februari 2018, yang dihadiri oleh perwakilan dari konsorsium BwN yaitu KKP, PUSAIR-KPUPR, Wetlands International, Deltares, Witteveen+Bos dan Blue Forests.

.....bersambung ke hal 22



Kunjungan tim SC BwN di lokasi tambak dengan sistem mixed-mangrove aquaculture (Foto: Apri Susanto Astra)



Wisata Berbasis Lahan Basah, antara Kenangan Manis dan Risiko

*Mochamad Arief Soendjoto**

Disadari atau tidak, saat ini wisata berbasis lahan basah menjadi bagian kehidupan dan tujuan favorit para wisatawan untuk mengisi waktu liburannya. Kawasan wisata tersebar di seluruh pelosok tanah air mulai dari Sabang hingga Merauke. Lahan basah pun beragam, mulai dari lahan basah buatan, seperti danau bekas penambangan hingga lahan basah yang masih alami, seperti sungai, danau alam, dan pantai (pesisir), baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi prasarana wisata tambahan, seperti *waterboom* atau *waterpark*.

Di Medan, salah satu kawasan wisata berbasis lahan basah yang menarik wisatawan adalah

penangkaran buaya, satwa yang dilindungi Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Di sini wisatawan tidak hanya disugahi morfologi (tampilan fisik) buaya yang dikenal sebagai hewan buas, tetapi juga perilaku satwa melata ini ketika disugahi pakan berupa ayam atau bebek hidup yang dibeli wisatawan di penangkaran tersebut.

Di Jakarta, dapat dikatakan tak seorang pun yang tidak mengenal Ancol, kawasan wisata buatan di pesisir pantai Jakarta dan Kepulauan Seribu, kawasan wisata yang terdiri atas pulau-pulau kecil di lepas pantai Jakarta. Beberapa pulau di Kepulauan

Seribu adalah perkampungan nelayan dan pulau-pulau lainnya dikembangkan sebagai kawasan wisata untuk menyelam atau sekedar jalan-jalan sepanjang pantai.

Bogor yang terletak di wilayah pegunungan memiliki Taman Safari. Di kawasan wisata ini obyek wisata utama para wisatawan adalah hewan-hewan liar, tetapi untuk melihat-lihat tampilan tubuh dan perilaku hewan ini para wisatawan harus melewati lahan basah. Bagaimana tidak? Air adalah bagian hidup dari kuda nil atau burung-burung air yang ditonton wisatawan. Air juga yang sengaja dialirkan terus menerus di atas badan jalan dan sudah pasti dilalui para



Gambar 1. Dermaga untuk wisata susur Sungai Martapura, Banjarmasin (Foto: M. Arief Soendjoto)

wisatawan di atas kendaraan (minimal roda empat) selama menikmati obyek wisata utama di dalam kandang-kandang hewan buas yang ukurannya cukup luas.

Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta susur sungai adalah wisata andalan. Dalam wisata ini adrenalin wisatawan setidaknya dipacu. Wisatawan merasakan suasana tubing, duduk di atas ban-dalam besar, mengapung, dan bergerak mengikuti aliran Sungai Oyo dari hulu ke hilir. Sambil ber-tubing-ria, wisatawan dapat mengarahkan pandangan matanya untuk menikmati pemandangan di tepi kiri kanan sungai serta Gua Pindul.

Raja Ampat, Papua Barat bisa jadi sedikit lebih unik. Wisatawan tidak sekedar menikmati wisata berbasis lahan basah dan bahkan lebih luas lagi wisata bernuansa laut, tetapi juga wisata yang dibingkai legenda Raja Ampat. Banyak versi terkait dengan legenda ini yang diwariskan turun temurun dalam kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kelahiran empat lelaki dan satu perempuan dari lima butir telur yang ditemukan oleh sepasang suami isteri. Kelak empat lelaki inilah yang disebut sebagai raja-raja yang menguasai

daerah-daerah tertentu di kawasan Raja Ampat.

Kalimantan Selatan pun tidak ketinggalan dengan wisata berbasis lahan basah. Hampir semua kota/kabupaten di provinsi ini memiliki dan mengembangkan wisata berbasis lahan basah.

Kota Banjarmasin misalnya. Dalam kurun waktu 4-5 tahun ini kota yang dibangun atau memang didirikan di lahan rawa ini mengembangkan wisata susur Sungai Martapura (Gambar 1). Pada susur sungai jarak dekat, wisatawan perlu mengeluarkan uang Rp5.000 per orang untuk naik klotok menyusuri Sungai Martapura bolak balik. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1 km atau paling lama 15 menit perjalanan. Pada susur sungai jarak jauh, wisatawan mengeluarkan uang sekitar Rp35.000 untuk naik klotok menyusuri Sungai Martapura dan menuju Pulau Kembang atau pasar terapung Lok Baintan, sebelum akhirnya kembali ke pelabuhan asal.

Kota Banjarbaru mengembangkan Danau Seran atau Danau Cermin, danau bekas penambangan intan sebagai kawasan wisata. Di sini wisatawan dapat berjalan-jalan

menikmati suasana danau, melihat dan mendengar musik panggung, atau naik klotok dengan tarif Rp5.000 per orang.

Kabupaten Tanah Laut yang wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Laut Jawa memertahankan Batakan dan Takisung sebagai kawasan wisata pantai. Selain itu, kabupaten ini membuka kawasan baru untuk wisata pantai yang namanya merupakan akronim nama tempat, seperti Joras (akronim dari Jorong – Asamasam), Asmara (Asamasam Muara, Gambar 2), dan Turki (Tungkarani Kiri). Ketiga kawasan wisata pantai ini menjadi alternatif pengganti Batulima, kawasan wisata pantai yang kemudian terbengkalai (Warta Konservasi Lahan Basah 2017, 25(3):3,16-17).

Pengembangan wisata berbasis lahan basah tentu menggembirakan. Pada satu sisi komponen fisik, kimia, dan biologi lahan basah beserta peran dan fungsinya masing-masing dapat lestari. Pada sisi lain, kemanfaatannya sebagai alternatif tamasya murah meriah bersama keluarga serta untuk meningkatkan pendapatan keluarga (masyarakat) serta pendapatan asli daerah (PAD) terus berlanjut.

.....bersambung ke hal 23



Gambar 2. Pantai Asmara, Kabupaten Tanah Laut (Foto: M. Arief Soendjoto)

Budidaya Kepiting Soka (*Scylla sp*)

*Kuswanto**

B*uilding with Nature* merupakan konsep pendekatan ekologis sekaligus peningkatan mata pencaharian masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pembangunan kontruksi untuk perangkat sedimen dengan melibatkan masyarakat. Upaya peningkatan mata pencaharian masyarakat dilakukan melalui perbaikan budidaya dengan pendekatan Bio-rights, yaitu suatu mekanisme pendanaan dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan dengan cara menyediakan pinjaman untuk usaha ekonomi kepada masyarakat (kelompok) yang dapat diubah statusnya menjadi hibah jika persyaratan dalam kontrak kerjasama mencapai persentase tertentu yang telah disepakati.

Abdul Munif (36 tahun) warga Dusun Baru Desa Surodadi

Kecamatan Sayung Demak, merupakan anggota kelompok Berkah Alam penerima Bio-rights untuk budidaya penggemukan kepiting bakau. Budidaya penggemukan kepiting bakau sangat prospektif, tidak butuh lahan lebar dan relatif waktu lebih singkat. Untuk penggemukan kepiting bakau dapat dilakukan melalui budidaya didalam keramba atau budidaya langsung di tambak. Sebelum melakukan budidaya penggemukan kepiting di tambak, sebaiknya lahan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian tancapkan bambu-bambu sebagai tiang disekeliling tambak, lalu pasang jaring dengan mengikatkan pada bambu-bambu yang telah terpasang. Sebaiknya ukuran jaring 50-70 cm lebih tinggi dari pematang, dengan posisi miring ke dalam agar kepiting tidak mudah keluar dari kolam budidaya.

Pengalaman Abdul Munif untuk budidaya penggemukan kepiting bakau sebanyak 93.6 kg sampai 8 kali penebaran (setiap hari 1 x penebaran), dikarenakan sulitnya mencari bibit yang seragam dan sesuai dengan keinginan. Sebaiknya pilih bibit yang sudah layak konsumsi, sehingga tidak memakan waktu lama untuk budidaya sekaligus meminimalisir resiko kematian. Saat ini harga kepiting kropos/kurus Rp.55.000/ kg.

Untuk perawatan kepiting perlu menjaga kualitas air dengan cara memberikan MOL (Mikro Organisme Lokal) sekaligus pakan tambahan yang berasal dari ikan rucah. Ikan rucah dicincang hingga berukuran kecil, lalu ditebar merata di kolam setiap sore hari. Harga ikan rucah saat ini Rp.5.000/ kgnya.



Abdul Munif dengan tambak budidaya penggemukan kepiting bakaunya (Foto: Kuswanto)

Biasanya waktu yang diperlukan agar kepiting siap dipanen setelah kepiting gemuk antara 5-7 hari dari penebaran terakhir.

Saat panen, kolam perlu dikeringkan menggunakan mesin. Agar kepiting tidak rusak atau masuk ke mesin perlu dipasang penyekat, menggunakan jaring. Setelah kering kemudian di tangkap satu-persatu dan diikat menggunakan tali rafia. Untuk menghindari kemungkinan tergigitnya tangan saat panen, maka sebaiknya pemanenan dibantu oleh 2 pekerja yang sudah ahli. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap dan mengikat kepiting-kepiting tersebut, asalkan kolam bisa kering.

Wahyu Nurjanti istri Abdul Munif juga turut ambil bagian, mencuci kepiting yang sudah ditangkap dan diikat, sehingga kepiting siap untuk dibawa ke tengkulak.

Sejak penebaran pertama sampai panen, didapati kepiting yang mati sebanyak 6 ekor. Dari total 93.6 kg saat dipanen menjadi 95 kg dengan harga Rp.90.000/kg, sedangkan kebutuhan makanannya sebanyak 52 kg yang berasal dari ikan rucah. ••

* *Wetlands International Indonesia*
kus.santren@gmail.com



Panen kepiting (atas); Kepiting yang sudah diikat lalu dicuci (bawah) (Foto: Kuswantoro)

Berita Lahan Basah

..... sambungan dari halaman 11

Lokakarya Nasional "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan"

D. Penyusunan Kebijakan Terkait Pengendalian Penggunaan Air Tanah

1. Memasukkan substansi tentang perbaikan pengelolaan air tanah ke dalam RUU SDA;
2. Menyusun dan segera menetapkan peraturan penetapan Zona Konservasi Air Tanah sebagai acuan dalam pemberian rekomendasi teknis air tanah untuk penerbitan Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah atau penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Menyusun kebijakan terkait Konservasi Sumber Daya Air Tanah, termasuk di dalamnya mekanisme insentif dan disinsentif;
4. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan

Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah

E. Penegakan Hukum

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan dan peraturan terkait pencegahan penurunan muka tanah, konservasi sumber daya air tanah, dan konservasi lahan basah pesisir.

F. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Akibat Penurunan Muka Tanah

1. Melakukan studi dan penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tindakan adaptasi dan mitigasi yang efektif dan sesuai dengan kondisi di masing-masing lokasi;

2. Meningkatkan ketangguhan masyarakat di wilayah pesisir dalam mengurangi risiko bencana yang terkait dengan air dan hidrologi;
3. Mendorong desa-desa pesisir untuk membentuk tim siaga bencana desa serta menjalankan kearifan lokal dalam menghadapi bencana;
4. Mendukung penetapan bencana yang terkait dengan air dan hidrologi, di antaranya kejadian rob yang diakibatkan oleh penurunan muka tanah di daerah yang sudah terdampak secara luas.
5. Mengutamakan penanganan bencana berbasis masyarakat (*social engineering*), yakni dengan mendorong ketahanan masyarakat dan melalui pendekatan kultural.

Jakarta, 27 Maret 2018

AWC 2018: Si Bluwok (Wilwo, *Mycteria cinerea*) "Nasibmu, di Segara Anakan Cilacap"

Elisabet Rose R.B. Hutabarat*, Setyo W. Pamuji, Galih S. Anggara, Ganjar C. Aprianto, Iftah S. Ahmadi, Irda Alifah, Nugroho D. Septianto, Teguh S. Nurrudin, Yunizar Rahman, Aditya A. Syaputra, Imam A. Musa, dan Haryo Pangestu B. Krisna

Hai sobat Wetlands International, Asian Waterbird Census 2018 telah berakhir. Kami penggiat lingkungan hidup di Cilacap dan sekitarnya telah berkomitmen menjadi bagian kegiatan AWC selama 4 tahun (2015-2018) terakhir di Segara Anakan Cilacap. Menurut Ardlı dan Wolff (2009) Segara Anakan Cilacap merupakan hutan mangrove dengan luas 34.018 ha yang terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (07°34'29.42"–07°47'32.39" LS dan 108°46'30.12"–109°03'21.02" BT). Prakoso (2003) menjelaskan bahwa Segara Anakan Cilacap merupakan lahan basah yang

dimanfaatkan oleh burung air untuk mencari makan dan beristirahat.

Salah satu jenis burung air penting yang teramati di Segara Anakan adalah jenis Bluwok *Mycteria cinerea*. Hutabarat *et al.* (2016) menyebutkan bahwa *M. cinerea* mengalami fluktuasi kelimpahan individu di Segara Anakan Cilacap. Jenis ini tercatat sebanyak 77 ekor saat dilaksanakan AWC tahun 2015 (Hutabarat *et al.* 2015), 21 ekor pada tahun 2016, dan sayangnya tidak tercatat pada tahun 2017. Kegiatan sensus pada tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Januari 2018 mencatat kembali sebanyak 88 ekor.

Perkiraan Populasi *M. cinerea* di Indonesia adalah sekitar 2.000 ekor yang tersebar di Sumatera, Jawa, Sumbawa, Bali, Buton, Rawa Apo dan masih bersarang di Suaka Margasatwa Pulau Rambut DKI Jakarta (MacKinnon *et al.* 1999; Iqbal *et al.* 2012; IUCN 2016). Di Segara Anakan mereka beraktivitas mencari makan, beristirahat, dan merapihkan bulu bersama-sama dengan jenis bangau lainnya, yaitu Bangau Tongtong (*Leptoptilos javanicus*) dan Bangau Sandang-lawe (*Ciconia episcopus*). Menurut MacKinnon *et al.* (1999) *M. cinerea* sering tercatat di derah yang tergenang air, berlumpur di tepi pantai dan



Bluwok di Segara Anakan Cilacap (Foto: Galih Wahyu Setya Anggara)

sawah dalam kelompok kecil maupun soliter ataupun kelompok campur dengan burung air lainnya. IUCN (2016) telah menetapkan *M. cinerea* berstatus Terancam (*Endangered*) akibat kehilangan habitat alamnya yang telah mengalami alih fungsi lahan. Menurut Hutabarat (2016) *M. cinerea* tercatat memangsa ikan dan invertebrata air lainnya di Segara Anakan Cilacap sebagai pakan utamanya.

Ancaman habitat di Segara Anakan Cilacap semakin nyata, dari permasalahan sedimentasi yang memunculkan pendangkalan sehingga menyulitkan spesies ikan migrasi untuk memijah ataupun sekadar mencari makan di Segara Anakan Cilacap. Sebagian masyarakat disekitar yang biasa bekerja sebagai nelayan sudah mulai beralih mata pencaharian menjadi petani, dengan membuka areal mangrove untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Kami, penggiat lingkungan hidup dari Himpunan Mahasiswa Bio-Explorer Fakultas Biologi UNSOED Purwokerto, Silvagama Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Save Our Nusakambangan Island, Gerakan Citanduy Lestari dan Ighopala IAIG Cilacap akan terus melakukan pemantauan

dan publikasi terhadap salah satu spesies terancam tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Wetlands International Indonesia yang telah mendukung kegiatan kami baik materiil maupun moril serta selalu menerima kami menjadi *volunteer* pada kegiatan AWC. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di AWC 2015-2018 yang berbeda-beda dari perwakilan setiap organisasi yang tergabung dalam monitoring tersebut. Semoga Segara Anakan selalu masih ada untuk habitat burung air di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ardli ER, Wolff M. 2009. Land use and land cover change affecting habitat distribution in the Segara Anakan Lagoon, Java, Indonesia. *Reg Environ Change*. 9:235–243. doi:10.1007/s10113.008.0072.6

Prakoso A. 2003. Penyebaran dan pendugaan diversitas burung air pada berbagai tipe habitat di kawasan Segara Anakan Cilacap [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

MacKinnon J, Philipps K, van Balen B. 1999. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Bogor (ID): Burung Indonesia.

Prakoso A. 2003. Penyebaran dan pendugaan diversitas burung air pada berbagai tipe habitat di kawasan Segara Anakan Cilacap [skripsi].

Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hutabarat ERB, A. Kusmawanto, EW Lestari, TA Gupta, IB Pertiwi, VD Sulistyaningrum, Zenudin. 2015. Asian Waterbird Census (AWC) 2015: Burung air di kawasan Laguna Segara Anakan Cilacap. Dipublikasikan poster pada Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia 1. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Iqbal M. H, Mulyono, A. Riwan, F. Takari. 2012. An alarming decrease in the Milky Stork *Mycteria cinerea* population on the east coast of South Sumatra province, Indonesia

[Tim AWC Segara Anakan Cilacap]. 2016. Sensus burung air di Segara Anakan Cilacap. [Tidak dipublikasi]

[Tim AWC Segara Anakan Cilacap]. 2017. Sensus burung air di Segara Anakan Cilacap. [Tidak dipublikasi]

Hutabarat ERB, A. Mardiasuti, Y.A. Mulyani. 2016. Keanekaragaman dan kelimpahan burung air di Muara Sungai kawasan Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah. *Media Konservasi* 21(1):65-72

[IUCN]. 2016. *Mycteria cinerea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697651A93627701. Diakses [Januari 21, 2017] pada www.iucnredlist.org/details/22697651/0

* Email: lisbetz.rose@gmail.com / savenusakambangan@gmail.com

Si Genting Wilwo



Wilwo (Ilustrasi: Triana)

Burung Wilwo (*Milky Stork, Mycteria cinerea*) cukup mudah dikenali karena ukuran badannya yang lebih besar dibandingkan burung air lainnya (mendekati 100 cm). Bulunya secara umum didominasi warna putih dengan bulu sayap hitam dan paruh merah muda kekuningan. Biasanya ditemukan di wilayah mangrove, hamparan lumpur, rawa, tambak atau bahkan sampai ke pesawahan. Mereka sebagian besar tersebar di Indonesia, dan populasi lainnya di Kamboja dan Malaysia. Populasi global mereka pada akhir tahun 1980an diperkirakan sekitar 5.000 ekor, tetapi kemudian menurun menjadi hanya sekitar 2.200 ekor saja. Sebaran populasi terbesar terdapat di Indonesia, dan sisanya di daratan Asia Tenggara (tidak lebih dari 100 ekor). Sumatra masih memiliki populasi terbesar (sekitar 1.600 ekor), sementara di Jawa tersisa sekitar 500 ekor dengan populasi berbiak terpusat di Pulau Rambut, Jakarta. Di Sulawesi tercatat kurang dari 100 ekor di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Secara umum populasi mereka cenderung menurun, diakibatkan karena terjadi perburuan serta hilang dan menurunnya habitat mereka untuk mencari makan dan berbiak. Karena status populasinya tersebut, sejak tahun 2013 burung Wilwo telah memperoleh status Genting (*Endangered*) dari IUCN *Red List of Threatened Species*, naik dari sebelumnya berstatus Rentan (*Vulnerable*) pada tahun 1994 – 2012. Masih diperlukan survey dan penelitian yang lebih mendalam untuk pemantauan populasi mereka serta mengetahui wilayah sebaran lain, mengetahui pergerakan dan memastikan kebutuhan ekologisnya.

(Yus Rusila Noor, dari berbagai sumber)

Palas, Si Pahit yang Berkhasiat

Palas (*Licuala paludosa*), salah satu jenis tanaman famili palem-paleman yang banyak tumbuh di daerah rawa gambut. Pohon yang hidup merumpun menjulang tinggi ini memiliki banyak manfaat. Daunnya berbentuk seperti kipas dan biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pembungkus ketupat, batang cukup kuat bisa dijadikan sebagai alat tongkat, sedang pangkal batang bawah yang berbentuk lapisan pelepah didalamnya terdapat batang lunak seperti umbi yang bisa dimakan sebagai lalapan. Umbi tersebut rasanya sangat pahit, namun menurut sebagian masyarakat yang suka mengkonsumsi, Palas memiliki khasiat menambah nafsu makan.

(Triana, dari lapangan)



Pohon Palas (kiri); Umbi pangkal Palas yang dapat dimakan (kanan)
(Foto: Triana)

..... sambungan dari halaman 3

Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir Kota:

Membangun Ketangguhan Marunda melalui Platform Multi Pihak MURIA (*Marunda Urban Resilience in Action*)

Kompleksitas permasalahan di Marunda tidak memungkinkan untuk dicarikan solusinya tanpa adanya kerjasama multi pihak yang lintas sektor.

Berdasarkan analisa risiko menggunakan Kerangka Ketangguhan yang dikembangkan Cordaid Belanda, KARINA Yogyakarta dan Bina Swadaya Konsultan bersama masyarakat mengidentifikasi keseluruhan permasalahan untuk menentukan aspek-aspek yang paling berisiko di Marunda.

Terkait dengan Kajian Risiko yang sudah dilakukan beserta kapasitas akhir yang akan disasar, maka bentuk *Platform* Multi Pihak dinilai bisa menyasar semua intervensi dan diharapkan bisa bekerja lintas sektor sehingga kolaborasi antar pihak menjadi suatu keniscayaan.

Platform multi pihak ini sampai saat ini terdiri dari Masyarakat Marunda, Pemerintah Kelurahan Marunda, Pemerintah DKI Jakarta, Bina Swadaya Konsultan, KARINA Yogyakarta, East West Seed Indonesia (Panahmerah), Humanitarian Open Street Map Indonesia (HOT), Forum PRB-API DKI Jakarta, Care International Indonesia, serta Cordaid dan Ford Foundation Indonesia yang memberikan dukungan teknis dan pendanaan program MURIA. Sementara anggota lainnya melakukan kolaborasi sesuai dengan kepentingan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Misalnya program Pertanian Perkotaan Tahan Risiko yang difasilitasi oleh EWINDO Panahmerah dan Bina Swadaya Konsultan termasuk sinkronisasinya dengan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Program Pengembangan Budaya Pemrosesan Air Hujan yang difasilitasi oleh KARINA Yogyakarta serta Program *Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE) yang difasilitasi oleh Care International Indonesia.

Beragam program yang berjalan di Marunda melalui *platform* MURIA tersebut bertujuan sama yaitu untuk memperkuat kapasitas masyarakat Marunda terutamanya dalam penguatan penghidupan dan pola hidup bersih sehat.

Platform MURIA berkolaborasi dengan Partners for Resilience-Strategic Partnership Indonesia, berhasil mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didalam menghasilkan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018-2030, dimana Tata Kelola Risiko Terpadu (Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen dan Restorasi Ekosistem) digunakan sebagai acuannya.

Diharapkan *platform* serupa bisa direplikasi nantinya melalui desain besar pertanian perkotaan tersebut. Dengan demikian dapat mendukung pelaksanaan pertanian perkotaan yang tahan risiko di wilayah Jakarta yang lebih luas untuk lebih jauh membangun ketangguhan Kota Jakarta.♦♦

* KARINA - yohan@karina.web.id

**KARINA - arfianakh@gmail.com



Degradasi Ekosistem dan Padatnya Populasi menjadi Permasalahan Marunda (Foto: Dok. KARINA)

..... sambungan dari halaman 13

Rangkaian Kegiatan Steering Committee Meeting Program BwN



Diskusi dan makan malam (Foto: Yus Rusila Noor)

Fokus pertemuan TC ini lebih pada pelaksanaan program BwN di lapangan seperti desain, monitoring, dan implementasi perlakuan perlindungan pesisir dan sosial-ekonomi, serta pengarusutamaan pendekatan BwN di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa hasil dari pertemuan TC tersebut:

1. *Update* rencana kerja bersama program BwN tahun 2018 antara konsorsium, KKP dan PUSAIR-KPUPR;
2. Rencana kerja bersama WI Indonesia dengan KKP terkait kegiatan di Desa Purworejo;
3. Berbagi informasi kegiatan penelitian dan pemantauan yang terkait dengan isu penurunan muka tanah, struktur perlindungan pesisir, sedimentasi, oseanografi, dan rehabilitasi pesisir di Demak dan/atau pantai utara Jawa;
4. Penyesuaian isi kesepakatan kerjasama BwN antara konsorsium BwN, KKP dan PUSAIR-KPUPR;
5. KKP akan memfasilitasi dialog mengenai status tanah timbul dan penelitian penerapan BioRights di Demak;
6. KKP akan melakukan penelitian penggunaan cangkang kerang hijau sebagai material pengisi struktur;
7. Publikasi bersama konsorsium BwN mengenai laju sedimentasi di Demak;
8. Perlu dibuat sebuah konsep tentang kemungkinan mekanisme Bio-rights di dalam APBN. KKP bersedia untuk memfasilitasi proses dengan instansi pemerintah terkait;
9. Bentuk kerjasama kegiatan terkait BwN dapat ditujukan kepada KKP dengan mengetahui EcoShape dan Wetlands International;
10. KKP meminta sebuah tabel yang berisi informasi kegiatan sejak dimulai hingga saat ini untuk digunakan sebagai bahan materi komunikasi.

* *BwN-Wetlands International Indonesia*
sonasthra@gmail.com

** *BwN-Wetlands International Indonesia*
oliviaanday@gmail.com



Pertemuan Technical Committee program Building with Nature (Foto: Yus Rusila Noor)

Masripatin. 2017. Kenali dan Lindungi Lapisan Ozon. Ditjen Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK, various pp.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENLHKJ/SETJEN/KUM.1/7/2017 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 30 pp.

Novitri, F., R.D. Carolyn and (et. al). 2017. ROADMAP Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim 2017-2030 Menuju Pencapaian NDC 2030. Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, xii + 45 pp.

Rudianto, W. 2017. Belajar dari Lapangan: Kisah Keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara Partisipatif. Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Berita Lahan Basah

..... *sambungan dari halaman 15*

Wisata Berbasis Lahan Basah, antara Kenangan Manis dan Risiko

Namun, pengelola kawasan wisata seringkali tidak menyadari bahwa berwisata di lahan basah memiliki resiko lebih tinggi daripada di lahan kering. Ketidaksadaran berdampak pada pengabaian banyak hal penting.

Misalnya adalah kebersihan dan keindahan. Tujuan berwisata adalah menikmati keindahan dengan suasana bersih. Apabila kedua faktor ini terlanjur diabaikan, bukan hal mudah untuk mengatasinya. Selain itu, jangan berharap pula kawasan itu dikunjungi banyak wisatawan dan dengan frekuensi tinggi.

Berikutnya terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ketidak-adaan atau ketidakkonsistenan perawatan prasarana dan sarana dapat menimbulkan masalah besar. Pada akhir tahun 2017 seorang wisatawan meninggal dan sekian puluh orang menderita luka setelah jembatan bambu yang dilewati sejumlah wisatawan di kawasan wisata di daerah Bogor,

Jawa Barat runtuh. Jangankan jembatan bambu yang mudah lapuk, jembatan besi atau beton pun akan menimbulkan masalah bila tidak dirawat.

Pencegahan dan penanganan segera kecelakaan adalah hal lain yang juga tidak boleh diabaikan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kerjasama dengan instansi lain seperti Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memberi informasi turunnya hujan sangatlah penting. Informasi itu dapat mencegah jatuhnya korban banjir bandang pada wisatawan yang bermain-main di sungai berbatu. Banyak orang tidak menyadari bahwa rambu-rambu petunjuk, himbauan, peringatan, dan larangan harus dipasang sebanyak mungkin dan diletakkan pada titik-titik yang mudah dilihat. Rambu-rambu ini meningkatkan kewaspadaan wisatawan terhadap bencana. Banyak orang tidak mengingatkan bahwa rompi penyelamat seharusnya disediakan oleh pemilik klotok atau kapal air dalam jumlah cukup.

Rompi penyelamat menjadi alat untuk wisatawan mengapung bila terjadi kecelakaan di sungai atau danau. Banyak orang kesugihan menemukan lokasi prasarana atau sarana kesehatan serta menghubungi tenaga medis. Hal-hal ini penting bagi penanganan segera korban kecelakaan.

Wisatawan tentu saja sangat berharap bahwa bukan hanya kenangan manis yang didapat setelah berkunjung ke obyek atau lokasi wisata berbasis lahan basah. Lebih daripada itu, mereka pulang ke rumah bersama anggota keluarga dalam kondisi sehat dan bahagia. Mereka tidak ingin biaya yang dikeluarkannya berdampak buruk pada jiwa.

Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Ahmad Yani Km 36 Banjarbaru 70714; Program Magister Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Hasan Basry Banjarmasin 70123; masoendjoto@gmail.com

WETLANDS INTERNATIONAL

GLOBAL OFFICE

PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
post@wetlands.org
www.wetlands.org

INDONESIA

Jl. Bango No. 11
Bogor 16161
admin@wetlands.or.id
http://indonesia.wetlands.org

ISSN:
0854-963X

Foto Cover:
Lahan Basah bagi
Ketangguhan Perkotaan,
(Sumber: Wetlands
International South Asia)

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) adalah majalah yang diterbitkan oleh Wetlands International Indonesia secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan di Indonesia yang disampaikan oleh berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.



Wetlands International



@WetlandsInt



Wetlands International



Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Wetlands
INTERNATIONAL

Pencetakan warta ini didanai oleh program Partners for Resilience Strategic Partnership (PFRSP)



PARTNERS FOR RESILIENCE

Jumlah kejadian bencana alam dan bencana akibat kelalaian manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Selain itu, perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan juga semakin meningkatkan risiko bencana terutama bagi kalangan miskin yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Oleh karenanya, sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Di Belanda, Partners for Resilience Strategic Partnership (PFRSP) merupakan sebuah aliansi yang terdiri lima organisasi yakni CARE Netherland, Cordaid, the Netherlands Red Cross, the Red Cross Red Crescent Climate Centre dan Wetlands International yang bersama-sama mengembangkan program kemitraan strategis, untuk mendorong penerapan pengelolaan resiko yang terintegrasi / Integrated Risk Management (IRM) mulai dari tingkat global hingga di tingkat lokal. IRM merupakan sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang menggabungkan 3 pendekatan yakni pengurangan resiko bencana (DRR), adaptasi perubahan iklim (CCA) dan restorasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (ERM). Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mendorong penerapan IRM dalam domain kebijakan, praktek dan investasi.

Di Indonesia, PFRSP beranggotakan 5 organisasi yang masing-masing merupakan perwakilan dari organisasi yang beraliansi di tingkat global. Kelima organisasi tersebut antara lain CARE International Indonesia, the Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia), Wetlands International Indonesia, Karina KWI Yogyakarta dan the Red Cross Climate Centre. Kelima organisasi ini berkolaborasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia dengan mendorong implementasi IRM, yang dielaborasi kedalam 5 lintasan kerja. Masing-masing lintasan kerja dipimpin oleh satu organisasi.

Wetlands International Indonesia (WII) menjadi salah satu anggota aliansi PFRSP Indonesia yang memimpin kegiatan lobby dan advokasi IRM di lintasan kerja/trajectory 4. Lintasan ini bertujuan untuk mendorong penerapan IRM didalam rencana investasi pembangunan *lowlands ecosystem* yang bijaksana dan berkelanjutan (khususnya kawasan ekosistem mangrove dan gambut).